

## Tiga Proyek Terbesar Untuk Setiap Daerah di Kalimantan Selatan



Sumber gambar:

<https://www.kilasbanua.com/tiga-proyek-terbesar-untuk-setiap-daerah-di-kalimantan-selatan/>

Tahun 2023, pemerintah daerah di seluruh wilayah Kalimantan Selatan akan kembali melakukan sejumlah pembangunan. Radar Banjarmasin merangkum proyek dengan anggaran terbesar di Pemprov Kalsel dan masing-masing kabupaten/kota.

Untuk proyek provinsi, tiga proyek terbesar yang mulai dikerjakan tahun ini adalah pembangunan tugu nol kilometer tahap II (multiple years) dengan anggaran Rp 128,8 miliar. Pembangunan Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari (multi years) dengan anggaran Rp 121 miliar. Proyek pembangunan arena olahraga (GOR) lainnya di Banjarbaru dengan anggaran Rp 64,6 miliar.

Kepala Dinas Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel Ryan Tirta Nugraha mengatakan, kelanjutan pembangunan tugu nol kilometer di Banjarmasin akan dimulai pertengahan tahun ini. “Diharapkan selesai dan dapat dimanfaatkan sebelum masa jabatan Gubernur Kalsel berakhir pada Oktober 2024,” harapnya.

Ia mengatakan, tinggi tugu itu sekitar 99 meter. Tapi yang bisa didaki hanya 66 meter. “Nanti juga ada lokasi UKM dan plaza,” ujarnya.

Adapun pembangunan Masjid Syekh Arsyad Al-Banjari di sekitar kantor Sekretariat Daerah Kalsel saat ini memasuki tahap lelang. Pembangunan masjid ini, kata

Ryan, akan dilakukan secara multiyears. “Tahun 2023 dianggarkan sekitar Rp80 miliar, dan tahun berikutnya Rp41 miliar,” ujarnya.

Anggaran itu hanya untuk pembangunan gedung utama dan sejumlah fasilitas pendukung. “Insya Allah masjid ini akan selesai pada akhir tahun 2024,” ujarnya.

Luas bangunan masjid 4.000 meter persegi, dengan daya tampung 3.000 jamaah. Secara desain, masjid akan berbentuk piramida, dengan sirkulasi terbuka dan sistem penerangan.

Sementara di Banjarmasin, pembangunan gedung baru DPRD Kota Banjarmasin merupakan proyek dengan anggaran terbesar. Sekitar Rp 39 miliar.

Kemudian, pembangunan Sekretariat Bersama Ormas, Ormas, dan Ormas. Nominal yang dicairkan adalah Rp 26,6 miliar.

Sedangkan untuk pengadaan jalan di Komplek Perumahan Paket 11 (Herlina Perkasa JL Batu Zamrud, Herlina Perkasa JL Batu Jade, Herlina Perkasa JL Keruing, Herlina Perkasa JL Cemara) anggarannya sebesar Rp5,7 miliar.

Pembangunan gedung baru DPRD Banjarmasin hampir rampung. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) juga bersiap untuk melakukan uji tuntas. “Hampir 100 persen penataan fisik bangunan sudah terpasang. Sekarang tinggal uji kelayakan,” kata Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Suri Sudarmadyah, baru-baru ini.

Menurut Suri, pembangunan gedung tersebut sama sekali tidak menemui kendala. Ia yakin proyek tersebut dapat diselesaikan sesuai target. “Kami optimistis akan selesai sesuai target dan waktu yang ditentukan,” ujarnya.

Suri menjelaskan, sejauh ini proyek pembangunan sudah memasuki tahap penyempurnaan. Pekerjaan harus dilakukan dengan hati-hati dan detail agar sesuai dengan rencana. Hal itu dilakukan agar saat gedung mulai digunakan tidak ada kendala.

Di Hulu Sungai Tengah (HST), proyek terbesar yang sedang dikerjakan saat ini adalah pembangunan kolam pengatur banjir. Tambak ini dibangun di daerah aliran sungai (DAS) antara Desa Aluan Besar, Kecamatan Batu Benawa dan Desa Mandinding, Kecamatan Barabai. Luasnya mencapai 57,29 hektar dengan biaya sekitar Rp 280 miliar. Namun, pembangunannya dibiayai dari APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR).

Selain itu, ada pembangunan Rp. 7,5 miliar jembatan gelagar baja di Desa Alat, Kecamatan Hanntak. Ada pula pengganti jembatan konstruksi rangka baja di Hinas Kiri-Atiran, Batang Alai Timur dengan nilai Rp 5,5 miliar.

Di Tanah Laut, proyek terbesar yang sedang dilaksanakan adalah pembangunan rumah sakit tipe D di Kecamatan Bumi Makmur dengan anggaran Rp 34 miliar. Penataan

kawasan Angsau, Kecamatan Pelaihari dengan dana Rp 45 miliar. Rehabilitasi Jalan Hadji Boejasin senilai Rp 33 miliar.

Pindah ke Tapin, di kawasan ini dilakukan Pembangunan Kawasan Kejaksaan Negeri Tapin senilai Rp 15 Miliar. Kemudian, melanjutkan proyek gedung penunjang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) baru dengan anggaran 14,4 miliar. Serta membangun jembatan penghubung Desa Kalumpang dan Desa Tampunang dengan anggaran Rp 10 miliar.

Di Kabupaten Banjar, proyek terbesar yang dilaksanakan pemerintah daerah adalah pembangunan jembatan di Pejambuan, Kecamatan Sungai Tabuk (fase I). Anggarannya Rp 10 miliar. Kemudian, relokasi UPT Puskesmas Sungai Tabuk 1 yang merupakan sub kegiatan pembangunan Puskesmas dengan anggaran Rp9,7 miliar. Ada pula pemeliharaan berkala ruas jalan Cindai Alus-Batas Kota Banjarbaru dan rekonstruksi jalan menuju bandara (Veteran, Tungkarau, Sei Sipai) senilai Rp 9,1 miliar.

Proyek terbesar di Tabalong antara lain Rehabilitasi Jalan Kaong–Bilas, Rehabilitasi Jalan Kembang Kuning–Bilas dan Rehabilitasi Jalan Kembang Kuning–Nawin. Anggarannya, Rp 13,3 miliar. Pembangunan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak (dana DAK) Rp 4,4 miliar. Pemkab Tabalong juga tengah melaksanakan pembangunan waduk berkapasitas 346.000 per meter kubik di Desa Nalui, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong senilai Rp 10 miliar.

Beralih ke Pemko Banjarbaru, ada tiga proyek terbesar bernilai miliaran rupiah yang akan dijalankan pemda. Pertama, proyek pembangunan Kantor Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan dan Anak (DP2KBPMPP2A) di Kota Banjarbaru. Proyek yang dikerjakan Dinas PUPR Banjarbaru ini memiliki plafon Rp 10,9 miliar. Lokasi pelaksanaannya di Taman Gembira, Desa Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan.

Kedua, Dinas PUPR melaksanakan pembangunan Gedung Serba Guna milik Polres dan rehabilitasi Ruang Mapolres Banjarbaru. Anggarannya Rp 5,8 miliar. Pemko Banjarbaru juga akan membangun kolam di Gunung Kupang, Kecamatan Cempaka, Banjarbaru dengan nilai plafon Rp 4,6 miliar.

Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah (BKPPD) Hulu Sungai Selatan (HSS), Hendra Darmawang mengatakan, tiga proyek terbesar tahun ini semuanya dalam satu organisasi perangkat daerah (OPD). “Semua proyek ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten HSS,” ujarnya, Selasa (20/6).

Mulai dari pemeliharaan ruas Jalan Kamawakan-Malinau, Kecamatan Loksado, dengan anggaran lebih dari Rp12 miliar. Perluasan pusat pelayanan publik kabupaten

(MPP) lebih dari Rp 7 miliar, serta pemeliharaan ruas Jalan Wasah Hilir-Telaga Bidadari, Kecamatan Simpur, lebih dari Rp 7 miliar.

Sedangkan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, terdapat tiga proyek terbesar yang akan berlangsung pada tahun 2023 di link LPSE HSU. Proyek tersebut menangani longsor di Desa Paliwara senilai Rp 8,1 miliar. Ada pula lanjutan penanggulangan longsor di Jalan Patmaraga, Desa Murung Sari dengan nilai Rp 1,1 miliar. Proyek lainnya adalah pembangunan ruang administrasi SMPN 7 Amuntai (DAK Fisik) dan rehabilitasi ruang laboratorium sains (DAK Fisik) dengan nilai Rp 895,1 juta.

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.kilasbanua.com/tiga-proyek-terbesar-untuk-setiap-daerah-di-kalimantan-selatan/>, 26 Juni 2023.
2. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/21/06/2023/ini-rangkuman-tiga-proyek-terbesar-masing-masing-daerah-di-kalsel/>, 21 Juni 2023.

#### **Catatan:**

**Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik**

#### **✚ Pasal 2**

##### **Ayat (1)**

DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi:

- a. DAK Fisik Reguler;
- b. DAK Fisik Penugasan; dan
- c. DAK Fisik Afirmasi.

##### **Ayat (2)**

DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan dan keluarga berencana;
- c. Perumahan dan pemukiman;
- d. Pertanian;
- e. Kelautan dan perikanan;
- f. Industri kecil dan menengah;

- g. Pariwisata;
- h. Jalan;
- i. Irigasi;
- j. Air minum;
- k. Sanitasi;
- l. Pasar;
- m. Energi skala kecil;
- n. Lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- o. Transportasi.

🌟 Struktur APBD



🌟 Belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004)

